

# Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem Kabupaten Wonosobo

Development Collaboration Margomarem Rural Area Wonosobo  
Regency

Ayu Annisa Annasihatul Ainaqo<sup>1</sup>, Wiwandari Handayani<sup>1</sup>, Fadjar Hari Mardiansyah<sup>1</sup>

Diterima: 14 Juni 2023

Disetujui: 20 September 2023

**Abstrak:** Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan beberapa desa melalui kolaborasi multi aktor dengan tahapan antara lain pembentukan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kawasan Perdesaan Margomarem merupakan kawasan gabungan lima desa di Kabupaten Wonosobo yang terbentuk atas inisiatif pemerintah yang kemudian disambut baik oleh masyarakat lokal. Dengan modal sosial dan kerja sama yang kuat, Kawasan Margomarem ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui SK Bupati Wonosobo Nomor 050/383/2020. Kawasan Margomarem kemudian menyusun perencanaan kawasan dan mulai melaksanakan pembangunan sejak akhir tahun 2021. Dalam setiap tahap, pembangunan Kawasan Margomarem melibatkan kolaborasi dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis *stakeholder mapping*, analisis bentuk kolaborasi, dan analisis *collaborative governance*. Studi ini menunjukkan bahwa aktor kunci dalam kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem yaitu BKAD, Pemerintah Desa, Bumdesma, Sekolah Lapang, Shirvano Consulting, dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan. Aktor-aktor kunci tersebut saling berkolaborasi dengan aktor pendukung lainnya membentuk *quadruple helix* yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, dan komunitas. Kawasan Margomarem berjalan atas dasar kolaborasi, bergerak secara kolaboratif, dan dalam prosesnya mengalami dinamika kolaborasi. Kolaborasi yang terjadi dalam setiap tahap pembangunan Kawasan Margomarem telah mendorong akselerasi pembangunan wilayah berbasis perdesaan.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance, Kolaborasi Pembangunan, Stakeholder Mapping, Quadruple Helix*

**Abstract:** Rural area development is the development of several villages through multi-actor collaboration with stages including formation, determination, planning, implementation, monitoring and evaluation. The Margomarem Rural Area is a combined area of five villages in Wonosobo Regency which was formed initiative of the government which was then welcomed by the local community. With strong social capital and cooperation, the Margomarem Area was determined by the Wonosobo District Government through District Head Decree Number 050/383/2020. The Margomarem Area then prepared regional planning and began carrying out development from the end of 2021. At each stage, the development of the Margomarem Area involved collaboration from various actors. This study aims to examine the collaborative development of the Margomarem Area. The analytical method used is stakeholder mapping analysis, collaboration form analysis, and collaborative governance analysis. This study shows that

---

<sup>1</sup> Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro

Korespondensi: annisaayu204@gmail.com

the key actors in the development of the Margomarem Area are BKAD, Village Government, Bumdesma, Field Schools, Shirvano Consulting, and the Department of Tourism & Culture. These key actors collaborate with other supporting actors to form a quadruple helix consisting of government, public, private and community elements. The Margomarem area operates on the basis of collaboration and synergy. The collaboration that occurs in each stage of the development of the Margomarem Area has accelerated the development of rural-based areas.

*Keywords: Collaborative Governance, Development Collaboration, Stakeholder Mapping, Quadruple Helix*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dengan jumlah penduduk perkotaan tertinggi ke-lima di dunia (UN DESA, 2019). Penduduk perkotaan di Indonesia diproyeksikan mengalami peningkatan dari 49,8% pada tahun 2010 menjadi 66,6% pada tahun 2030 (BPS, 2020). Kemudian menurut data World Bank (2015), lahan perkotaan di Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di Asia Timur dengan peningkatan rata-rata sebesar 1,1% per tahun dari sekitar 8.900 km<sup>2</sup> pada tahun 2000 menjadi 10.000 km<sup>2</sup> pada tahun 2010. Meningkatnya jumlah penduduk dan luas lahan di perkotaan mendorong pembangunan berbagai layanan yang fokus di perkotaan sehingga mengakibatkan ketertinggalan pembangunan perdesaan (Tacoli, 1998; Sadyohutomo, 2013).

Pembangunan perdesaan di Indonesia telah diupayakan dalam berbagai bentuk kebijakan dan program untuk mengoptimalkan potensi desa. Namun, pembangunan perdesaan dari dulu hingga sekarang belum menampakkan hasil yang signifikan (Diartika & Pramono, 2021). Menurut (Zhu et al., 2019), pembangunan perdesaan dapat diupayakan melalui pembenahan birokrasi dan kebijakan. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan perdesaan ditunjukkan dengan adanya pembentukan lembaga khusus yang menangani perdesaan, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Selain itu juga adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang menjadi acuan dalam pembangunan desa. Adanya lembaga dan kebijakan khusus mengenai desa menjadikan desa memiliki otoritas untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Rustiadi, et.al, 2021).

Salah satu konsep turunan pembangunan desa yang tercantum dalam UU Desa yaitu Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 2016. PKP merupakan pembangunan desa melalui jalan kolaborasi multi aktor (*collaborative governance*) mulai dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, hingga media dan komunitas. Desa-desanya yang memiliki potensi atau aktivitas ekonomi yang sama dan berada dalam satu lokasi geografis dapat bergabung membentuk sebuah kawasan yang lebih luas. Desa-desanya diperkuat dengan jalan kolaborasi membentuk kawasan supaya dapat bersaing secara seimbang dengan pembangunan perkotaan (Diartika & Pramono, 2021; Adisasmita, 2010).

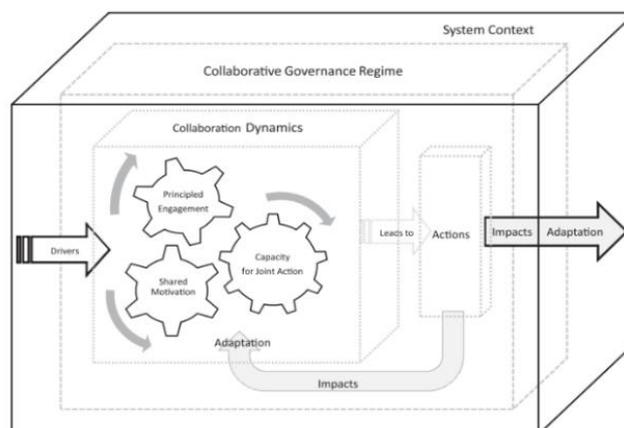
Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan proses yang panjang. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2016, proses PKP memiliki tahapan mulai dari pengusulan kawasan perdesaan, proses penilaian, penetapan kawasan perdesaan, penyusunan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Kunci utama keberhasilan PKP adalah kolaborasi yang kuat dari semua aktor terkait (Dinsospermades Wonosobo, 2022). Jika semua aktor seperti masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi,

media, dan komunitas mampu menjalankan perannya masing-masing dengan maksimal maka pembangunan perdesaan dapat optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Chang et al., 2022).

O' Flynn & Wanna (2008) mengartikan kolaborasi sebagai bentuk kerjasama dengan orang lain (Denny, 2017). *Collaborative governance* merupakan tata kelola yang mengatur pemangku kepentingan yang saling berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan akhir mencapai kesepakatan bersama (Ansell & Gash, 2008; Mutiarawati & Sudarmo, 2017). Menurut Agrawal & Lemos (Balogh, 2011), *collaborative governance* tidak terbatas melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor privat, masyarakat, komunitas sipil, dan lainnya dalam berbagai level. Kerjasama diinisiasi atas dasar keterbatasan kapasitas, sumber daya, serta jaringan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga dengan kerjasama diharapkan dapat melengkapi kekurangan untuk mencapai tujuan bersama (Purwanti, 2016).

Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan komponen penting dalam keberhasilan pembangunan (Clement et al., 2022). Pembangunan kota (Clement et al., 2022) dan wilayah perdesaan (Nordberg et al., 2020) mengonseptualisasikan kolaborasi dalam bentuk *quadruple helix* atau gabungan empat pemangku kepentingan yaitu pemerintah, industri, masyarakat, dan akademisi. Empat pihak yang berkolaborasi tersebut tidak terlibat dalam hubungan dorong-tarik searah melainkan interaksi dua arah yang berlapis-lapis dan dinamis (Schütz et al., 2019). *Quadruple helix* menuntut pemerintah untuk menjalankan peran penyelarasan pemangku kepentingan yang lain untuk menuntun dan mengarahkan interaksi dalam kolaborasi (Clement et al., 2022).

Menurut Balogh (2011) dan Emerson et al (2012) *collaborative governance* memiliki tiga dimensi, yaitu konteks sistem, penggerak kolaborasi, dan dinamika kolaborasi. Dimensi pertama yaitu konteks sistem yang diartikan sebagai kondisi hukum, politik, *sosial* ekonomi, dan lingkungan yang unik, kompleks, dan saling terkait di suatu wilayah yang akan memfasilitasi atau menghambat tata kelola kolaboratif (Che & Hickey, 2021). Dimensi pertama ini memiliki 5 elemen (Ansell & Gash, 2008) dalam Che & Hickey (2021) yaitu kondisi sumber daya, kerangka kebijakan dan hukum, keterhubungan jaringan, konflik antar kepentingan, serta dinamika politik dan relasi kekuasaan. Dimensi kedua atau penggerak kolaborasi/*drivers* merupakan konsep *collaborative governance* yang mendorong tercapainya tujuan tata kelola. Dimensi penggerak kolaborasi ini memiliki empat elemen yaitu kepemimpinan, insentif konsekuensial, ketergantungan, dan ketidakpastian (Balogh, 2011; Emerson et al., 2012). Kemudian dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu prinsip keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bergabung (Balogh, 2011; Emerson et al., 2012).



Sumber : Balogh, 2011; Emerson et al., 2012

**Gambar 1. Dimensi Kolaborasi**

Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masih bercorak kental perdesaan. Kabupaten Wonosobo secara umum memiliki potensi utama berupa pertanian dan pariwisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kabupaten Wonosobo direncanakan memiliki beberapa kawasan perdesaan baru. Kawasan Perdesaan Margomarem merupakan kawasan perdesaan yang dibentuk pertama kali di Kabupaten Wonosobo melalui SK Bupati Nomor 050/383/2020. Kawasan Perdesaan Margomarem terdiri dari gabungan lima desa yaitu Maron, Tlogo, Menjer, Larangan Lor, dan Mlandi yang ada di Kecamatan Garung.

Pembangunan Kawasan Margomarem termasuk model pembangunan campuran *top down - bottom up* dan melibatkan kolaborasi berbagai aktor. Terbentuknya Kawasan Margomarem bermula atas prakarsa pemerintah daerah pada tahun 2017 yang kemudian disambut baik oleh masyarakat lokal setelah berproses selama tiga tahun. Pada tahun 2020 dilakukan penetapan kawasan bersamaan dengan penetapan kelembagaan kawasan yang terdiri dari BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa) dan Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Selanjutnya pada tahun 2021 dilakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan lima tahunan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hingga pada akhir tahun 2021, Kawasan Margomarem mulai mengimplementasikan atau melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, swasta, dan komunitas.

Adanya kerja sama multi aktor dalam setiap tahap pembangunan mendorong akselerasi kemajuan Kawasan Margomarem sebagai wilayah berbasis perdesaan. Meskipun pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem telah berjalan, namun pembangunan belum menunjukkan hasil yang signifikan karena baru berjalan satu tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk dan dinamika kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah mengenai pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan konsep baru di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Firdaus, 2018). Desain studi kasus memberikan manfaat mendalam mengenai suatu kasus beserta proses dan dinamika dalam studi dalam rangka menggambarkan, menjelaskan, dan mengeksplorasi untuk memperoleh pemahaman yang relevan (Creswell, 2014; Kumar, 2011; Leavy, 2017). Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kawasan Perdesaan Margomarem Kabupaten Wonosobo. Berjalannya setiap tahap pembangunan Kawasan Margomarem mulai dari pengusulan pembentukan, penetapan, perencanaan, hingga pelaksanaan pembangunan terjadi karena adanya kolaborasi yang baik dan konsisten oleh antar aktor di dalamnya. Penentuan objek penelitian didasarkan pada pertimbangan adanya kolaborasi yang kuat dan konsisten dalam pembangunan perdesaan, namun masih dibutuhkan kajian penerapan prinsip keberhasilan pembangunan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menangkap pikiran, persepsi, dan perasaan seseorang terhadap topik atau fenomena untuk kemudian dipahami dan dianalisis secara ilmiah (Raco, 2010). Informan wawancara dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria informan yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Babbie, 2013). Informan dalam penelitian ini antara lain dari unsur pemerintah desa, pemerintah daerah, swasta, komunitas, serta tokoh masyarakat. Fokus utama wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem yaitu peran setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan kawasan serta kolaborasi yang terjadi berdasarkan dimensi *collaborative governance*. Selain itu juga dilakukan observasi untuk memotret secara langsung wilayah studi sehingga dapat memperoleh informasi nonverbal yang tidak diperoleh melalui wawancara.

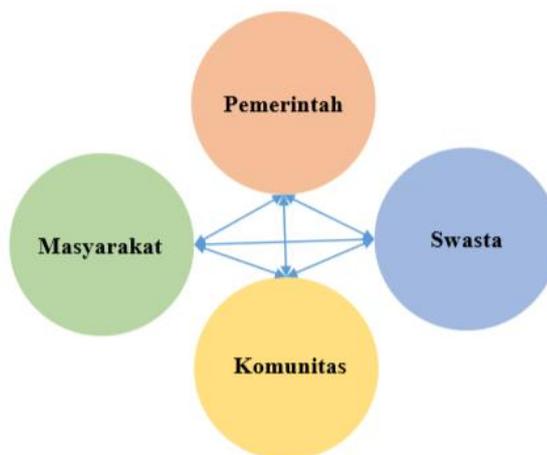
Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu analisis *stakeholder mapping*, analisis bentuk kolaborasi, dan analisis kolaborasi berdasarkan dimensi *collaborative governance*. Analisis *stakeholder mapping* digunakan untuk mengategorisasikan seluruh sampel penelitian menjadi aktor kunci dan pendukung berdasarkan pengaruh dan kepentingan (DFID, 2003; SDP, 1995). Penentuan aktor kunci dan pendukung didasarkan pada kriteria tingkat pengaruh dan kepentingan. Kriteria tingkat pengaruh antara lain pengaruh sumber daya, kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan anggaran. Sementara kriteria tingkat kepentingan antara lain kepentingan terhadap sumber daya alam, kepentingan terhadap sumber daya manusia, kepentingan finansial, kepentingan informasi, dan kepentingan intermediasi (Budiharsono, 2021; Riyanto & Mardiansjah, 2018; Artha et al., 2019). Kemudian analisis bentuk kolaborasi dilakukan untuk mengkaji hubungan antar aktor yang terlibat dalam kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem. Selanjutnya berdasarkan bentuk kolaborasi yang terjadi tersebut, kemudian dilakukan analisis kolaborasi berdasarkan dimensi *collaborative governance* untuk melihat dinamika dalam proses berkolaborasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis *Stakeholder Mapping*

Pembangunan Kawasan Margomarem didasarkan pada amanat UU Desa terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) yang meliputi pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan kawasan, penyusunan rencana tata ruang kawasan secara partisipatif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan RPKP Margomarem Tahun 2022-2026, Pembangunan Kawasan Margomarem mengarah pada pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Periode awal pembangunan difokuskan pada penguatan kelembagaan antar desa dan melebarkan jejaring, membangun kapasitas masyarakat melalui program-program pelatihan, menata aset-aset fisik kawasan, serta membangun manajemen usaha perdesaan berbasis agrowisata. Aktor-aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem terdiri dari unsur pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan komunitas.



**Gambar 2. Aktor Pembangunan Kawasan Margomarem**

Berdasarkan hasil kajian kebijakan dan wawancara diperoleh gambaran mengenai peran setiap aktor dalam pembangunan Kawasan Margomarem.

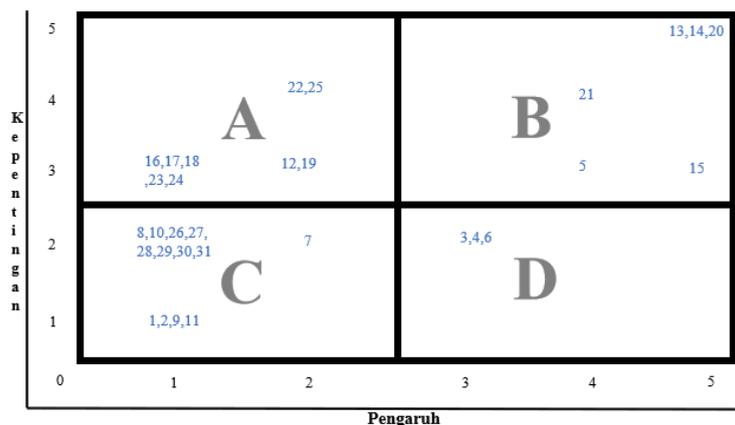
**Tabel 1. Aktor dan Perannya dalam Pembangunan Kawasan Margomarem**

Kode	Aktor	Peran
Pemerintah		
1	Kemendes PDTT	Kebijakan PKP
2	Bappeprov Jateng	Kegiatan Sekolah Lapang
3	Sekda Wonosobo	Pengusulan kawasan
4	Bappeda Wonosobo	Penunjukan SKPD yang menaungi kawasan Pengusulan kawasan
5	Disparbud Wonosobo	Pengawasan SKPD terkait kawasan Mengawal penetapan, perencanaan, dan pelaksanaan PKP
6	Dinsospermades Wonosobo	SKPD yang mengawal kebijakan dan anggaran kawasan
7	DPUPR Wonosobo	Peningkatan jaringan jalan di Kawasan Margomarem
8	Disnakertrans Wonosobo	Pembangunan SDM pariwisata kawasan
9	Dispaperkan Wonosobo	Pengembangan sektor pertanian kawasan
10	DLH Wonosobo	Penanganan sampah kawasan
11	Disdagkopukm Wonosobo	Pengembangan UKM kawasan
12	Pemerintah Kecamatan Garung	Pengawasan penetapan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan
13	Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)	Berperan aktif mengusulkan, menetapkan, dan merencanakan Kawasan Margomarem; basis koordinasi antar aktor; pengambil kebijakan tertinggi di Kawasan Margomarem
14	Pemerintah Desa	Memfasilitasi pengusulan, penetapan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem

Swasta		
15	PT Karangluhur Lima Pilar (Shirvano Consulting)	Penyusun rencana PKP dan Pendamping pelaksanaan program PKP Margomarem
16	Perum Perhutani	Mengelola dan memberikan perijinan pemanfaatan pada LMDH
17	PT Perkebunan Tambi	Kerjasama pengelolaan wisata dengan masyarakat pelaku wisata Desa Tlogo
18	PT Indonesia Power (PLTA Garung)	Kerjasama pengelolaan objek wisata dengan masyarakat Desa Maron
19	PT Tirta Investama (Danone Aqua)	Pendampingan program dan CSR pengembangan kapasitas masyarakat terkait produk UMKM kopi lokal
Kelompok Masyarakat		
20	Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Perencanaan bisnis kawasan, koordinator sub unit usaha Bumdesma dalam pembangunan ekonomi kawasan
21	Alumni Sekolah Lapang	Kader desa/pionir pembentukan Kawasan Margomarem Pengawasan pelaksanaan pembangunan
22	Pelaku Wisata/ Pokdarwis	Pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata
23	Gapoktan	Pengembangan pertanian Kawasan Margomarem
24	Pelaku Sampah/ KPSM	Penanganan sampah kawasan
25	Bumdes	Bekerja sama dengan Bumdesma dalam pengembangan ekonomi desa
26	PKK	Mengoordinir masyarakat untuk terlibat dalam penanganan sampah kawasan
27	Karang Taruna	Pemuda penggerak di desa
Komunitas		
28	Bank Sampah Wonosobo	Sosialisasi penanganan sampah kawasan
29	Aroundme	Mendampingi kegiatan promosi pariwisata kawasan
30	Best Course Wonosobo	Memfasilitasi kursus bahasa inggris pariwisata bagi <i>guide</i> /pelaku wisata kawasan
31	LPTP	Pengembangan konservasi berbasis ekonomi kawasan

Sumber: Survei Primer, 2022

Adapun tingkat pengaruh dan kepentingan setiap aktor disajikan dalam matriks pengaruh dan kepentingan. Matriks ini digunakan untuk mengategorisasikan aktor yang masuk dalam aktor kunci dan pendukung.



**Gambar 3. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Aktor Pembangunan Kawasan Margomarem**

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan tersebut, aktor yang masuk kotak B merupakan aktor kunci. Sementara aktor yang masuk dalam kotak A, C, dan D merupakan aktor pendukung dalam pembangunan. Aktor kunci pembangunan Kawasan Margomarem masuk dalam kotak B antara lain BKAD, Pemerintah Desa, Bumdesma, Sekolah Lapang, Shirvano Consulting, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo. Aktor-aktor tersebut merupakan kunci berjalannya pembangunan di Kawasan Margomarem karena memiliki pengaruh tinggi dan memiliki kepentingan positif yang selaras dengan dengan arah pembangunan kawasan.

Aktor pendukung pembangunan Kawasan Margomarem yang terdapat di kotak A antara lain Pemerintah Kecamatan Garung, PT Tirta Investama, Pelaku Wisata, Bumdes, Perum Perhutani, PT Perkebunan Tambi, PT Indonesia Power, Gapoktan, dan Pelaku Sampah. Aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pembangunan kawasan, namun memiliki pengaruh yang rendah karena bukan pengambil kebijakan.

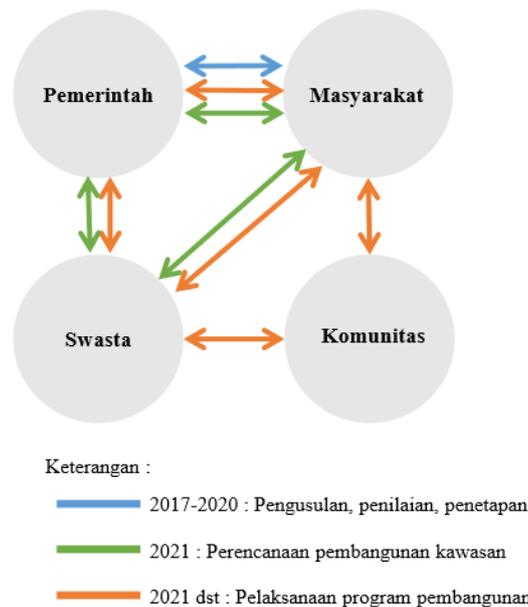
Kemudian aktor yang masuk kotak D antara lain Sekretariats Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Aktor-aktor tersebut memiliki keterlibatan dalam pembentukan, penetapan, perencanaan, dan monitoring pembangunan Kawasan Margomarem. Aktor-aktor tersebut memiliki tugas pokok fungsi masing-masing dalam pembangunan Kawasan Margomarem, namun memiliki keterkaitan secara tidak langsung terutama dalam pelaksanaan pembangunan.

Kemudian aktor pendukung dalam kotak C antara lain Kemendes PDPT, Bappeprov Jateng, PUPR, Dispaperkan, Disdagkopukm, Disnakertrans, DLH, PKK, Karang Taruna, Bank Sampah Induk Wonosobo, Aroundme, Best Course Wonosobo, dan LPTP. Aktor-aktor tersebut memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah dalam pembangunan Kawasan Margomarem. Namun, aktor-aktor tersebut dapat mengalami perubahan dalam pengaruh maupun kepentingannya sehingga penting untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil analisis diatas diketahui bahwa aktor kunci pembangunan Kawasan Margomarem berasal dari kelompok masyarakat, satu pihak swasta, dan satu unsur pemerintah daerah. Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain BKAD, Bumdesma, dan Sekolah Lapang yang merupakan kelembagaan kawasan. Kelembagaan kawasan tersebut didampingi oleh konsultan supaya kapasitasnya mengalami peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat merupakan aktor utama pembangunan. Jika seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi maksimal sesuai dengan perannya, maka akan terjadi pemerataan manfaat dan mengurangi dominasi kelompok. Masyarakat akan mudah bekerja sama dengan aktor-aktor yang lain sesuai bidangnya. Oleh karena itu, kelompok masyarakat selain kelembagaan kawasan dapat meningkatkan keterlibatannya sehingga dapat meningkatkan pengaruhnya dalam pembangunan Kawasan Margomarem. Dengan demikian akan terjadi kolaborasi yang semakin kuat antara masyarakat dan aktor-aktor lain baik dari pemerintah, swasta, komunitas, maupun yang lainnya.

### **Analisis Bentuk Kolaborasi**

Dalam teori kolaborasi, kerja sama yang melibatkan empat jenis pemangku kepentingan disebut *quadruple helix*. *Quadruple helix* menurut (Nordberg et al., 2020) dan (Schütz et al., 2019) terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Namun, dalam pembangunan Kawasan Margomarem tidak melibatkan akademisi melainkan melibatkan komunitas. Kolaborasi yang terjadi pada proses pembangunan Kawasan Margomarem melibatkan empat jenis pemangku kepentingan yaitu pemerintah, kelompok masyarakat, swasta, dan komunitas secara bertahap.



**Gambar 4. Bentuk Kolaborasi Pembangunan Kawasan Margomarem**

Pembentukan Kawasan Margomarem merupakan tahap awal dalam proses pembangunan kawasan. Di tahap ini, pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki peran dominan dalam mengendalikan kegiatan pembangunan. Pembentukan Kawasan Margomarem berawal dari adanya inisiatif pemerintah provinsi yang melihat adanya potensi pariwisata di Kawasan Telaga Menjer. Utusan Gubernur Jawa Tengah kemudian ditugaskan untuk mendampingi masyarakat desa-desa di Kawasan Telaga Menjer melalui Kegiatan Sekolah Lapang untuk melakukan penggalan potensi masing-masing desa. Pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendorong pengusulan pembentukan kawasan perdesaan di Kawasan Telaga Menjer. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, pemerintah provinsi dan kabupaten bersinergi mengawal pembentukan kawasan mulai dari pengusulan, penilaian, hingga penetapan kawasan. Pemerintah provinsi dan kabupaten mengatur kebutuhan administrasi kawasan, menyelenggarakan kegiatan musyawarah antar desa, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, serta mengarahkan tema pengembangan kawasan yang akan dikerjasamakan. Selain pemerintah provinsi dan kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa juga menjadi aktor utama yang menggerakkan masyarakat desa.

Dalam teori *quadruple helix*, masyarakat merupakan aktor tambahan dari adanya kolaborasi *triple helix* antara pemerintah, swasta, dan akademisi. Namun dalam pembangunan Kawasan Margomarem, masyarakat merupakan aktor utama pembangunan. Di tahap awal pembentukan kawasan, keterlibatan masyarakat cenderung pasif. Hanya tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang baik yang mampu mengikuti perkembangan pembangunan Kawasan Margomarem. Namun setelah dikawal oleh pemerintah daerah, sebagian masyarakat mulai memahami arah pembangunan kawasan. Hingga memasuki tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masyarakat mulai terbuka pemikirannya untuk berkolaborasi dalam

pembangunan kawasan setelah didampingi secara intensif oleh salah satu konsultan swasta (Shirvano Consulting).

Swasta merupakan pemangku kepentingan yang baru masuk ketika Kawasan Margomarem memasuki tahap perencanaan pembangunan. Pada awal tahun 2021, pengurus kawasan atau BKAD Margomarem menunjuk Shirvano Consulting sebagai konsultan yang membantu menyusun dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) lima tahunan. Dalam proses penyusunan RPKP, pengurus Kawasan Margomarem melibatkan beragam kelompok masyarakat dalam kawasan, pemerintah kabupaten dari berbagai macam dinas, hingga swasta yang beririsan atau memiliki aset dalam Kawasan Margomarem untuk berdiskusi menyusun dokumen perencanaan. Penyusunan RPKP dimulai dari penggalian isu strategis; penyusunan konsep, strategi, rencana; hingga penentuan program, kegiatan, dan pembiayaan yang dilakukan selama empat bulan melalui kegiatan pertemuan, *focus group discussion (FGD)*, survei, dan observasi lapangan. Dalam proses perencanaan inilah tiga jenis pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, swasta) terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem.

Rencana pembangunan Kawasan Margomarem mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Pengurus Kawasan Margomarem meminta Shirvano Consulting sebagai pendamping pelaksanaan program-program *quick win* yang telah direncanakan dalam RPKP. Dalam keberjalanannya, Tim Pendamping Shirvano bertugas untuk menguatkan SDM dan kelembagaan kawasan, serta membangun kolaborasi dengan berbagai aktor untuk melaksanakan program-program satu tahun pertama. Program-program pembangunan SDM dan kelembagaan yang dilaksanakan antara lain penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, *workshop*, studi banding, magang, serta *mentorship* terkait pariwisata dan pertanian bagi masyarakat. Tim Pendamping Shirvano juga memfasilitasi kolaborasi multi aktor untuk membangun manajemen usaha pertanian dan pariwisata, melakukan inovasi produk wisata, serta *branding* kawasan. Dampak dari adanya pendampingan adalah terbentuknya SDM internal kawasan yang berkualitas serta terjalinnya kolaborasi pelaksanaan program dengan berbagai aktor eksternal kawasan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan inilah aktor dari komunitas mulai tergabung dalam kegiatan pembangunan di Kawasan Margomarem.

Pembangunan Kawasan Margomarem merupakan pembangunan perdesaan yang melibatkan kolaborasi empat jenis pemangku kepentingan. Pembangunan berawal dari adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah yang kemudian merangsang semangat masyarakat lima desa untuk mengembangkan kawasannya. Selanjutnya, dukungan pemerintah dan modal sosial masyarakat lima desa tersebut pada akhirnya juga menarik perhatian beragam pihak baik swasta maupun komunitas luar wilayah untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Kawasan Margomarem (BKAD Margomarem, 2022). Artinya, mulai dari pembentukan hingga pelaksanaan, proses pembangunan Kawasan Margomarem telah melibatkan aktor dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan komunitas. Aktor-aktor tersebut telah dan akan saling berkolaborasi dan berbagi peran melaksanakan program-program pembangunan hingga tujuan bersama terwujud. Pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya tidak menutup kemungkinan akan terjalin kolaborasi dengan lebih banyak jenis aktor, diantaranya akademisi, media, dan lainnya (Shirvano, 2022).

### **Analisis *Collaborative Governance***

Pembangunan Kawasan Margomarem mulai dari tahap pengusulan pembentukan, perencanaan, hingga pelaksanaan yang baru berjalan satu tahun telah melibatkan kolaborasi dari beragam aktor. Terjadinya kolaborasi dapat dilihat dari tiga dimensi *collaborative governance* menurut Stephan Balogh (Balogh, 2011; Emerson et al., 2012).

## 1. Konteks Sistem

- Kondisi Sumber Daya: Berdasarkan dokumen RPKP, Kawasan Margomarem memiliki potensi utama berupa sektor pariwisata dan pertanian. Kedua sektor utama tersebut didukung oleh potensi seni budaya dan SDM yang melimpah di bidang pertanian.
- Kerangka Kebijakan dan Hukum: Kebijakan yang menaungi PKP Margomarem antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; SK Bupati Wonosobo Nomor 050/383/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem; Peraturan Bersama Kepala Desa Maron, Kepala Desa Tlogo, Kepala Desa Menjer, Kepala Desa Larangan Lor, Kepala Desa Mlandi tentang Kerja Sama Antar Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa Maron, Kepala Desa Tlogo, Kepala Desa Menjer, Kepala Desa Larangan Lor, Kepala Desa Mlandi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Margomarem; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020.
- Keterhubungan Jaringan: Aktor utama dalam pembangunan Kawasan Margomarem antara lain BKAD, pemerintah desa, Bumdesma, Sekolah Lapang, dan Shirvano Consulting. Aktor-aktor tersebut baik secara organisasi atau individu memiliki jaringan dan relasi yang menunjang pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem. Aktor utama juga saling terhubung dengan aktor-aktor pendukung berdasarkan jenis bidang yang dikerjasamakan.
- Konflik Antar Kepentingan: Dalam proses pembangunan Kawasan Margomarem mulai tahap pengusulan, perencanaan, hingga pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa aktor yang berbeda pendapat dan kepentingan. Konflik-konflik yang terjadi meliputi konflik antar sektor dan konflik antar desa. Namun, aktor-aktor tersebut mampu berkonsolidasi menyatukan arah dan prioritas pembangunan bersama. Kesepakatan bersama dari beragam perbedaan itu menjadi modal sosial yang paling dasar dalam pelaksanaan kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem. Bahkan modal sosial yang kuat yang dimiliki oleh internal kawasan mampu menarik perhatian aktor eksternal kawasan untuk terlibat dalam kolaborasi pembangunan Kawasan Margomarem.
- Dinamika Politik dan Relasi Kekuasaan: Setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem memiliki kedudukan/kekuasaan yang berbeda. Hal tersebut mempengaruhi tingkat keterlibatan setiap aktor, ada aktor yang sangat aktif dan juga ada aktor yang cenderung sebagai pengikut. Pelaksanaan pembangunan di Kawasan Margomarem masih berjalan dengan dominasi sekelompok aktor, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang merata supaya terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan program.

## 2. Penggerak Kolaborasi

- Kepemimpinan: Sejak penetapan kawasan, Kawasan Margomarem memiliki pemimpin yang loyal dengan pembangunan kawasan. Namun, pemimpin yang ada belum maksimal dalam memimpin pelaksanaan pembangunan. Keberjalanan program-program di Kawasan Margomarem masih dibantu oleh pendamping dari konsultan.
- Insentif Konsekuensial: Beberapa aktor yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem didorong oleh adanya harapan mendapatkan manfaat

untuk diri dan kelompoknya. Namun, banyak juga aktor yang bergabung dengan Kawasan Margomarem untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

- Ketergantungan: Setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu pengalaman, sumber daya, dan lainnya. Kondisi tersebut mendorong terjadinya kolaborasi dan pembagian peran antar aktor untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada di kawasan.
- Ketidakpastian Kawasan Margomarem telah membuat perencanaan yang akan dilaksanakan setiap lima tahun. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program satu tahun pertama, program-program yang dijalankan tidak selalu pasti sama dengan program yang telah direncanakan. Adanya ketidakpastian inilah yang membuat setiap aktor pembangunan kawasan harus inovatif dan aktif dalam berkolaborasi.

### 3. Dinamika Kolaborasi

- Keterlibatan: Dalam skala internal kawasan, setiap aktor baik yang menjadi pengurus maupun anggota belum semuanya mampu memahami posisi keterlibatannya dalam Kawasan Margomarem. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan peningkatan kapasitas SDM internal kawasan. Namun secara umum, setiap kelompok aktor yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem telah memahami posisinya dalam pembangunan.
- Motivasi Bersama: Terlepas dari kepentingan setiap pribadi dan kelompok, semua aktor yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem sepakat memperjuangkan tujuan yang sama.
- Kapasitas untuk Bergabung: Setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Margomarem memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Hal ini mempengaruhi kapasitas setiap aktor dalam memberikan ide, gagasan, dan pengaruhnya dalam pengembangan kawasan.

Dari hasil analisis *collaborative governance* diatas diketahui bahwa pembangunan Kawasan Margomarem memiliki sistem dasar kolaborasi. Kawasan Margomarem berjalan diatas kebijakan pemerintah yang lengkap mulai dari level nasional hingga level kabupaten dan desa. Kawasan Margomarem memiliki sumber daya yang dikolaborasikan, kemudian setiap aktor yang terlibat memiliki kedudukan dan kepentingan yang beragam, namun tetap mampu menyinkronkan menjadi tujuan bersama.

Kemudian dari awal dibentuk hingga berjalannya pembangunan, aktor-aktor yang terlibat dalam Kawasan Margomarem digerakkan oleh semangat kolaborasi. Pembangunan Kawasan Margomarem berjalan dengan adanya pengaruh pemimpinnya, dorongan kepentingan atau manfaat yang diinginkan oleh setiap aktor, serta kepercayaan satu sama lain untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Adanya perbedaan kepentingan, kedudukan, wawasan, pengalaman, dan sumber daya setiap aktor terutama di internal kawasan mengakibatkan terjadinya dinamika kolaborasi. Kapasitas yang beragam mempengaruhi tingkat keterlibatan dan motivasi setiap aktor dalam pembangunan Kawasan Margomarem. Oleh karena itu, Kawasan Margomarem perlu meningkatkan kapasitas SDM internalnya supaya terjadi pemerataan manfaat dan menghindari dominasi sekelompok aktor.

## KESIMPULAN

Kawasan Margomarem telah melakukan tahapan pembangunan kawasan mulai dari inisiasi pembentukan kawasan, pengusulan kawasan, penetapan kawasan, hingga perencanaan dan sejak akhir tahun 2021 telah memulai pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Kawasan Margomarem merupakan pembangunan yang berawal dari inisiasi pemerintah (*top down*) yang kemudian merangsang masyarakat lokal untuk berpartisipasi (*bottom up*). Adanya dukungan pemerintah dan modal sosial yang kuat dari masyarakat pada akhirnya menarik aktor-aktor lain baik swasta maupun komunitas untuk terlibat dalam pembangunan kawasan.

Pada tahap perencanaan hingga awal pelaksanaan, pembangunan Kawasan Margomarem telah melibatkan empat jenis pemangku kepentingan membentuk *quadruple helix*. Dari empat jenis pemangku kepentingan tersebut, sebagian besar aktor kunci berasal dari kelompok masyarakat antara lain BKAD, kepala desa, Bumdesma, Sekolah Lapang, satu pihak swasta Shirvano Consulting, dan satu unsur pemerintah Disparbud Wonosobo. Aktor-aktor tersebut saling berkolaborasi dan berbagi peran dengan aktor-aktor pendukung sesuai dengan latar belakang masing-masing. Aktor-aktor tersebut berhimpun dalam pembangunan Kawasan Margomarem atas dasar prinsip kolaborasi, bergerak secara kolaboratif, dan dalam prosesnya menghadapi dinamika kolaborasi.

Kolaborasi merupakan inti dari pembangunan kawasan perdesaan. Terjadinya kolaborasi antara unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas telah mendorong akselerasi pembangunan Kawasan Margomarem yang termasuk program baru terkait pembangunan perdesaan dari pemerintah. Dengan demikian terlihat bahwa pembangunan dengan jalan kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan keberlanjutan pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah melalui proses yang panjang penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian, antara lain *Shirvano Consulting*; kelompok masyarakat Kawasan Margomarem mulai dari BKAD, Bumdesma, hingga masyarakat secara umum; serta seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pihak swasta, dan komunitas luar kawasan yang telah berpartisipasi dan berbagi *insight* dalam pembangunan Kawasan Margomarem. Melalui penelitian ini harapannya dapat menjadi rujukan ilmiah mengenai pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan konsep baru di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, R. 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Artha, H. F., Akmal, D., & Nurhabibi, P. (2019). Analisis Stakeholder dalam Konflik Revitalisasi Emplacement Stasiun Kereta Api. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 61. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.61-66>
- Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research* (13th ed.). Wadsworth, Cengage Learning.
- Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- BPS. (2020). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaanhasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html>
- Budiharsono, S. (2021). *Disain Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir Berkelanjutan Secara Partisipatif di Kabupaten Subang*. August.
- Chang, Y., Hu, P., Huang, Y., & Duan, Z. (2022). Effectiveness and Heterogeneity Evaluation of regional Collaborative Governance on Haze Pollution Control: Evidence from 284 prefecture-level cities in China.

- Sustainable Cities and Society*, 88(August), 104120. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104120>
- Che, T. Q., & Hickey, G. M. (2021). Assessing the Potential for Collaborative Governance to support Cumulative Effects Assessment in the Indigenous Cree territory of Eeyou Istchee, Canada. *Journal of Environmental Management*, 298(August), 113444. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113444>
- Clement, J., Manjon, M., & Crutzen, N. (2022). Factors for Collaboration Amongst Smart City Stakeholders: A Local Government Perspective. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101746. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101746>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Denny, I. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 5, 1–12.
- Department for International Development. (2003). Stakeholder Analysis. In *Tools for Development*. <https://doi.org/10.1080/00358537608453236>
- Diartika, F., & Pramono, R. W. D. (2021). Program Pembangunan Kawasan Perdesaan : Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 372–384. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34503>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite dalam Pengelolaan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pematang. *Jurnal Ilmu Politik*, 9, 20–37.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Kumar, R. (2011). *Research Methodology, a Step-by-Step Guide for Beginners* (3rd ed.). SAGE Publishers Ltd.
- Leavy, P. (2017). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48–62.
- Nordberg, K., Mariussen, Å., & Virkkala, S. (2020). Community-Driven Social Innovation and Quadruple Helix Coordination in Rural Development. Case study on LEADER group Aktion Österbotten. *Journal of Rural Studies*, 79(December 2019), 157–168. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.001>
- ODA (1995c), Guidance Note on How to do a Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes, ODA Social Development Department, July 1995.
- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Center for Policy & Management Studies, FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Grasindo.
- Riyanto, S., & Mardiansjah, F. H. (2018). Kajian Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pati. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(1), 61. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i1.17659>
- Rustiadi, E., et.al, 2021, *Teori Perencanaan Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Jakarta; Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sadyohutomo, M, 2013, *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*. Yogyakarta; Penerbit Pustaka Pelajar
- Schütz, F., Heidingsfelder, M. L., & Schraudner, M. (2019). Co-shaping the Future in Quadruple Helix Innovation Systems: Uncovering Public Preferences toward Participatory Research and Innovation. *She Ji*, 5(2), 128–146. <https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.04.002>
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2018). Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2020). Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050/383/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Tacoli, C. (1998). Rural-Urban Interactions: a Guide to the Literature. *Environment and urbanization*, 10(1), 147-166.
- UN DESA. (2019). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420)*.
- World Bank. (2015). *East Asia's Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth*. World Bank.
- Zhu, J., Zhu, M., & Xiao, Y. (2019). Urbanization for rural development : Spatial paradigm shifts toward inclusive urban-rural integrated development in China. *Journal of Rural Studies*, 71(February), 94–103. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.08.009>